

EDITORIAL

Tolak Tipu, Lawan Lupa: Pembantaian Massal 1965-1966

“Kita mesti hidup tanpa dusta, jika tidak, kita tidak akan bebas.”

Alexander Solzhenitsyn¹

*“Tanpa ingatan tidak ada budaya. Tanpa ingatan tidak akan ada peradaban,
tidak ada masyarakat, tidak ada masa depan.”*

Elie Wiesel²

Waktu duduk di bangku SMP/SMA (1958-1963), sejarah politik masih disoroti dari perspektif para penguasa seperti kaisar dan raja, presiden dan perdana menteri. Dan memang pada masa itu penuturan sejarah politik sering digariskan oleh pihak yang berkuasa, pihak yang menang. Tapi, ketika mempelajari sejarah sosial di sekolah yang sama, kami diantar ke dalam getir gerak rakyat yang tertekan-tertindas, seperti pemberontakan kaum tani pada abad ke-13, urbanisasi besar-besaran pada abad ke-18, tuntutan serikat-serikat buruh dan pendirian koperasi kredit perdana pada abad ke-19, dan pembentukan Partai Buruh pada awal abad ke-20. Gurunya lain-lain; jelas juga pelajaran yang satu mempertanyakan pelajaran yang lain. Sejarah sosial mengikis kehebatan para raja sambil memperdepankan posisi rakyat biasa, dengan segala hasrat, strategi dan taktik juangnya. Dalam bahasa Alkitab: bukan sejarah dari perspektif raja Daud dan Solomo (sudut Deuteronomistik), tetapi sejarah sebagaimana disoroti nabi Amos, Hosea dan Yesaya (pihak nurani rakyat). Sebetulnya, sebagian besar sejarah masyarakat Allah dalam Alkitab ditulis dari pihak rakyat yang kalah.

1 Dari amanat Alexander Solzhenitsyn (survivor gulag Uni Soviet) tahun 1993 pada peresmian Tugu Peringatan Pembantaian Vendée di Les Lucs, Perancis, dua ratus tahun sebelumnya.

2 Elie Wiesel (survivor kamp konsentrasi Nazi), *Legends of Our Time*, New York: Knopf/ Doubleday Publishing Group, 2011 [aslinya 1967].

Tentu Bupati, Gubernur dan Presiden main peran dalam masyarakat. Namun, sejarah lebih teranyam oleh rupa-rupa kisah dari masyarakat biasa. Maka timbul pertanyaan: kajian sosial dan analisis politik mestinya dinilai dari pihak mana, pihak siapa? Pihak yang berkuasa atau pihak rakyat yang dikuasai? Bisakah kita menulis kembali sejarah NTT, umpamanya, dari sisi mereka yang kalah, bahkan dari perspektif mereka yang pernah disingkirkan, mereka yang dikalahkan, dibisukan, dan selama ini dilupakan? Sanggupkah kita menolak tipu dan melawan lupa dan membaca ulang sejarah kita dengan nurani rakyat yang murni?

Pada tahun 2012 sutradara Joshua Openheimer menayangkan film *Jagal*.³ Selama dua jam penuh sejumlah pelaku premen dengan bangga merekonstruksi pembunuhan-pembunuhan yang mereka lakukan pada tahun 1965/1966 “atas nama negara”. Para psikolog menyatakan bahwa manusia mampu membunuh sesamanya hanya jika sasarannya sudah distigmatisasi dan di-dehumanisasi. Manusia tidak bisa membunuh sesamanya begitu saja, akan tetapi kita siap menghabiskan obyek-obyek dan benda-benda yang kotor lagi najis, kita rela melibatkan diri dalam aksi “pembersihan lingkungan”. Nyatanya, pemutaran film *Jagal* berhasil membuka tabir yang selama lima puluh tahun menutup peristiwa pembantaian tragis-brutal tahun 1965/1966 dari ingatan kita, dari *memoria* bangsa kita. Jelas, sejarah resmi tahun 1960an disusun oleh para pemenang, oleh Orde Baru, bukan oleh mereka-mereka yang dikorbankan supaya Suharto bisa naik tahta. Mana ada buku sekolah yang mengingatkan kita bahwa rezimnya dikonsolidasikan dalam lautan darah, dan didirikan di atas jenazah ratusan ribu korban.⁴

Pada masa jabatan P.S. da Cunha selaku Bupati Sikka (1960-1967) pembantaian massal yang mengiringi Suharto ke istana Presiden menyapa wilayah Provinsi NTT termasuk Maumere di mana, di antara 20 Februari dan 29 April 1966, keganasan politik menelan antara 800 hingga 2000an

3 Lih. rubrik Resensi Film dalam Jurnal ini.

4 Jumlah korban pembantaian yang dipicu antek-antek Suharto berjumlah sekitar 500,000 hingga satu juta orang.

korban. Sampai kini belum ada pihak yang bertanggungjawab. KOMOP (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) digerakkan di Maumere di bawah Kasdim Mayor Inf. Sumarno yang melibatkan hampir semua organisasi kemasyarakatan dari Gereja Katolik dan Gereja Protestan, dari agama Kristen dan agama Islam, dan menyeret keterlibatan pengurus pilihan dari semua partai politik bersama ormas-ormasnya. Dengan mengikutsertakan hampir semua unsur masyarakat, baik para pelaku maupun keluarga korban dan para penyintas terbisu sampai saat ini,⁵ kebisuan para korban yang menjerit dengan seru ke surga dan didengar oleh Tuhan Sang Pembebas yang berbela rasa:

Akulah Allah leluhurmumu... Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku, dan Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang pemeras dan menuntun mereka keluar dari negeri itu... (Kel 3:6-8)

Apakah perlu *Jurnal Ledalero* memperingatkan – seakan-akan mengungkit kembali - kekejaman masa lalu? Apakah tidak lebih baik kita tetap lupa, tetap tipu diri, karena apa yang sudah berlalu sudah berlalu? Menghadap pertanyaan yang meruncing ini, kita diajak berpaling pada apa yang ditanyakan oleh penyintas *Sho'ah*, survivor kamp penyiksaan konsentrasi Nazi, Elie Wiesel:

Melupakan kekejaman manusia pada masa lalu, atau mengabaikan kekejaman yang terjadi pada masa kini, hari ini, yang terjadi di terlalu banyak tempat di seantero dunia, sungguh mengebalkan perasaan, dan bersifat picik lagi cupet. Melupakan kekejaman membuka peluang hingga kekerasan dapat terjadi lagi, malah lebih sering, lebih dekat kediaman kita. Itu sudah jelek. Namun, adalah bahaya yang sama besar jika kita mengabaikan tindakan keberanian orang yang mencenangkan lagi mengancam dirinya, tindakan keberanian yang meniadakan, membatalkan - malah membalikkan - tindakan kekerasan, dan yang

5 Satu-satunya pastor yang mengangkat suaranya di paroki adalah Rm. Pede di Bola. Lih. "Tidak ada Tuhan Allah Lain di Maumere", dalam Richard Muga Buku (ed.), *Tuang Pede: Kenangan Emas Imamat Rm. Yosef Frederikus da Lopez pr.* Maumere: Pusat Pastoral Keuskupan, 2013, hlm.41-65.

sekaligus menjunjung tinggi hak dan martabat kita bagi manusia. Dengan melupakan masa lalu kita melepaskan catatan sejarah manusia ke dalam genggamannya sosok-sosok yang menghancurkan, bukan di dalam tangan mereka yang menyelamatkan dan membangun.

Lagi, dalam pidato penerimaan Hadiah Nobel Perdamaian (1986), Elie Wiesel bergumul dengan godaan untuk melupakan adegan sejarah Nazi ke mana ia diseret dan amat menderita:

Tentu kita bisa coba melupakan masa lalu. Mengapa tidak? Apakah tidak wajar bagi manusia untuk menekan, menahan, malah menindas apa yang menyebabkannya merasa sakit, apa yang menyebabkannya malu?

Mengingat adalah tindakan mulia dan diperlukan. Panggilan ingatan, panggilan *untuk* mengingat, menjangkau manusia sejak titik awal sejarah. Di dalam Alkitab tidak ada perintah yang disampaikan lebih sering, dan dengan begitu tegas, daripada "*Ingatlah...*". Adalah tugas kita untuk mengingat kebaikan yang kita terima, lagi pula kejahatan yang kita derita.

Sumber harapan Ayub adalah *memori*nya, yang harus menjadi milik kita pula. Karena saya ingat, saya putus asa. Karena saya ingat, saya memiliki kewajiban untuk menolak putus asa. Saya ingat para pembunuh, saya ingat para korban, bahkan mengingat pada saat-saat saya berjuang untuk menemukan seribu satu alasan untuk berharap.⁶

Berharap sekalipun tak ada alasan untuk berharap (Lih. Rm 4:18). Karena itu, supaya kita benar-benar menolak penipuan penguasa dan melawan lupa penderitaan rakyat, kali ini *Jurnal Ledalero* menyajikan enam artikel seputar pembantaian 1965/1966 dengan fokusnya pada daerah NTT, diiringi berbagai analisis politik, psikologis dan agama.

Jan Djong dibantai di Rumah Tahanan Maumere setengah abad lalu, tepat pada 1 Maret 1966. Camat Kewapantai dan mantan anggota DPRD ini dipukul, dianiaya, diarak keliling kota dan, setelah ditolak permintaannya

6 Lih. "Hope, Despair and Memory", Pidato Nobel, 11 Desember 1986. Dalam *Nobel Lectures: Peace 1981-1990*, Ketua Dewan Penyunting Tore Frängsmyr, Penyunting buku Irwin Abrams, Singapura: World Scientific Publishing Co., 1997.

untuk menerima absolusi dari seorang pastor yang memang menanti di luar gerbang Rutan, yakni Franz Conelissen, svd,⁷ Jan Djong dicemooh dan dibunuh secara biadab di luar proses hukum. Seakan-akan stigma “PKI” dapat menghapus begitu saja martabat seorang manusia dan menghilangkan haknya mengikuti kewajiban agama. **Gerry van Klinken**, peneliti senior KITLV di Leiden, menguraikan secara rinci insiden pembunuhan politik di Maumere pada tahun 1966. Jan Djong merupakan salah satu korban awal dari antara 800 dan 2,000 orang yang menjadi sasaran keganasan politik yang mengantar Suharto ke istana negara. Sepatutnya, 50 tahun kemudian kita sudah merasa mampu menelusuri serta meluruskan kembali ingatan akan latar politik dari pembantaian massal yang mencekek nadi nurani seluruh kawasan Indonesia, tak terkecuali NTT. Kajian politik van Klinken menarik lagi tajam.

Dari kisah seorang korban kita beralih ke kisah para pelaku. Dengan tenang dan daya reflektif amat mendalam, **Mery Kolimon**, dosen UKAW Kupang dan dosen tamu STFK Ledalero, mengkaji kembali narasi para pelaku pembantaian di Timor, mereka yang sampai kini masih tetap memegang versi pemerintah mengenai penyebab pembantaian massal itu dan membenarkan tindakan-tindakan kejam yang mereka lakukan. Sambil menyelidiki psikologi pelaku, Mery Kolimon bergumul dengan tema-tema teologis yang muncul dari narasi sejumlah pelaku. Sebuah kajian teologis yang seyogianya kita renungkan bersama generasi yang saksi atau malah mengambil bagian dalam kebrutalan 1965/1966, dan sama pentingnya bersama generasi muda yang belum mengenal sejarah yang sebenarnya pada masa itu.

⁷ Penolakan pelayanan pastor masih ditemukan hingga hari ini. Misalnya, pada tgl. 18 Januari 2015, seorang warga Brazil bernama Marco Moreira dihukum mati di Nusakambangan dalam kasus narkoba. Sebelum ditembak mati, kendati berulang-ulang minta, Marco tidak diberikan kesempatan untuk menerima Sakramen Pengampunan, Perminyakan Suci atau Komuni (*Viaticum*). Menurut juru bicara Lapas Nusakambangan, Marco tidak mendapat pelayanan akhir dari seorang pastor Katolik “karena masalah administratif”. Paulus Siswantoko, sekretaris Komisi KP KC-KWI, menyatakan dengan tegas: “Hak asasi Marco dilecehkan pada saat-saat akhir hidupnya.” Surat keprihatinan oleh Carolus Burrows OMI (pastor Lapas Pasir Putih, Cilacap, tempat tahanan Marco) dikirim kepada Kedutaan Brazil di Jakarta, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi, Pimpinan OMI, Uskup Sunarko (Purwokerto), Ketua KWI, dan Komisi Kepausan JPIC (Vatikan). Peristiwa ini menjadi berita heboh di luar negeri lewat, antara lain, UCAN (Berita Gereja Katolik Asia, www.ucanews.com) dan FairFax Media Australia; hingga akhir Maret 2015 berita ini belum disiarkan lewat situs KWI (www.mirifica.net), biar hanya lewat sebuah tautan saja.

Van Klinken memperkenalkan seorang korban, Mery Kolimon memperdepankan sikap sejumlah pelaku, lantas **Karen Campbell-Nelson**, dosen UKAW Kupang, menyoroti kesaksian para penyintas. Karen, yang lama terlibat dalam rekaman-rekaman pengalaman pahit para penyintas dari Timor Leste, memiliki kesaksian dan kebenaran dalam wacana legal-yuridis, pula dalam wacana Kristen. Selama sekian tahun Karen mendengarkan kesaksian perempuan yang menceritakan pengalaman degradasinya dan bagaimana mereka bertahan tanpa kehilangan harapan dan kepercayaan. Kesimpulannya, “kesaksian akan kebenaran yang tulus ikhlas tidak bisa tanpa emosi yang intens”. Untuk memahami apa yang terjadi kita mesti membuka seluruh diri kita – akal, budi, dan hati nurani, dan membiarkan kisah-kisah para penyintas menembus lubuk hati kita yang paling mendalam.

Korban, pelaku dan penyintas. Kini **Justin Wejak**, alumnus STFK Ledalero, mengajak kita beralih kepada masyarakat NTT pada umumnya, kepada para saksi yang membungkam, rakyat yang dililiti rasa takut yang ngeri. Ketakutan masa itu bersifat ganda: takut akan PKI, takut akan fanatisme agama lain, dan, seusai turut aktif membunuh tetangganya yang dihancurkan oleh stigmatisasi “PKI”, ketakutan yang menghantui warga NTT secara menyeluruh. Sejalan dengan gagasan Martin Heidegger, ketakutan masa lalu selalu menyangkut ketakutan masa kini. Jadi, tetap relevan, tetap berdampak. Kita belum mengusir hantu yang satu ini – politik penakutan, politik ketakutan.

Dua tulisan berikut menyortir peristiwa tragis 1965/66 dengan mata tajamnya Hannah Arendt. **Yosef Keladu**, dosen filsafat STFK Ledalero, menganalisis ide Arendt tentang *worldlessness*, istilah yang diciptakan Arendt untuk menggambarkan kondisi di mana warga negara dirampas hak-hak asasinya dan tertakdir mengambang di luar dunia umum. *Worldlessness* berdampak ganda bagi mereka yang digiring menjadi pelaku kejahatan dan bagi mereka yang menjadi sasaran tindakan jahat pelaku. Rasanya, konsep *worldlessness* tepat untuk memahami “dunia” yang diciptakan Suharto pada awal rezim militernya.

Mathias Daven, dosen filsafat STFK Ledalero, mengangkat sisi lain dari gagasan Arendt: kamp-kamp konsentrasi didirikan oleh kaum

Nazi untuk menguji-coba dominasi total atas rakyat. Rezim totaliter manapun, termasuk rezim Orde Baru, tak mungkin bertahan tanpa teror: stigma PKI, julukan “Petrus”, “kiri baru”, “organisasi tanpa bentuk”, dan seterusnya. Maka, aksi politik pembasmian menghasilkan pembasmian politik. Tinggal pertanyaan yang menusuk: apakah kita mampu memulai suatu era politik baru?

Artikel terakhir berasal dari **Donatus Sermada**, alumnus STFK Ledalero, yang mengajak kita melihat kembali relevansi teori kritis dari mazhab Frankfurt bagi Indonesia masa kini. Secara khusus Donatus menyoroti gagasan Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse and Jürgen Habermas. Dalam rubrik Resensi Buku ditinjau dua karya yang berkaitan dengan tema kita Tolak Tipu, Lawan Lupa. Resensi buku *Kisah Pengembaraan Ibarruri Anak Sulung D.N. Aidit* ditulis oleh filsuf dan budayawan **Franz Magnis-Suseno**, dan resensi *Memori-Memori Terlarang* oleh **Karl Steenbrink**, sejarawan dari Utrecht. Kali ini ditambah pula sebuah tinjauan atas film Joshua Oppenheimer yang menggegerkan: *Jagal* [The Act of Killing] oleh **Otto Gusti Madung**.

Apakah suara hati kita bisa membangkitkan kemauan politik untuk menemukan, menggali lalu menguburkan kembali tulang-tulang para korban pembantaian 1965-1966 secara terhormat sesuai agamanya masing-masing, yakni tulang-tulang yang pernah dibuang di berbagai lokasi di seluruh NTT, antara lain di “kebun misi” di belakang Kantor DPRD, Maumere? Semestinya pula kita sudah merasa tepat membangun sebuah tugu peringatan, tugu *memoria passionis* bagi para korban di ibu kota masing-masing kabupaten dan provinsi agar peristiwa tragis itu jangan terus terhapus dari ingatan dan sejarah kita. Penyintas Elie Wiesel bermenung:

Lawannya cinta bukan kebencian melainkan ketidakpedulian. Kebalikan dari keindahan bukan keburukan melainkan ketidakpedulian. Kebalikan dari iman bukanlah bid’ah melainkan ketidakpedulian. Dan lawannya kehidupan bukanlah kematian melainkan ketidakpedulian antara hidup dan mati.⁸

8 Lih. *US News & World Report*, 27 October 1986.

Yakinnya Elie Wiesel, “Satu orang saja yang punya integritas dapat bertempur bagi kemanusiaan ratusan orang.” Inilah panggilan kita. Inilah tantangan kita. Sebagaimana ditegaskan Presiden Sukarno dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1966, dalam pidato terakhir dan pesan akhirnya kepada bangsanya, “*Jangan sekali-kali melupakan sejarah*” (Jasmerah). Kiranya edisi *Jurnal Ledalero* ini membantu membuka tabir ingatan kita agar siap bertempur demi perikemanusiaan, biar perjuangan ini bakal mengancam nyawa kita sendiri.

John Mansford Prior